

## TANTANGAN DAN PROSPEK KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Gauri Zantia<sup>1</sup>, Solehatun Nadila<sup>2</sup>, Suci Zami'ah afwi Hasibuan<sup>3</sup>, Afriza<sup>4</sup>, Muhammad amin<sup>5</sup>

[Gaurizantia38@gmail.com](mailto:Gaurizantia38@gmail.com)<sup>1</sup>, [sholehatunnadila22@gmail.com](mailto:sholehatunnadila22@gmail.com)<sup>2</sup>, [sucizamiahafwi30@gmail.com](mailto:suczamiahafwi30@gmail.com)<sup>3</sup>, [afriza@uin-suska.ac.id](mailto:afriza@uin-suska.ac.id)<sup>4</sup>, [muhhammadaminsft@gmail.com](mailto:muhhammadaminsft@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau<sup>1234</sup>, (STAI) Al-Kifayah Riau<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Lanskap kebijakan pendidikan terus berkembang, menghadirkan peluang yang menjanjikan sekaligus tantangan yang signifikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis prospek dan tantangan dari kebijakan pendidikan saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan hasil pendidikan sambil mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan literatur review manfaat utama dari literatur review adalah untuk memahami keadaan penelitian saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan membangun dasar teoritis untuk penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inovatif, seperti integrasi teknologi di kelas dan promosi pendidikan inklusif, memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan pengalaman dan hasil belajar. Namun, tantangan seperti disparitas alokasi sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan hambatan sosial-ekonomi masih sangat menonjol. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan memiliki potensi besar untuk mengubah sistem pendidikan, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, dan evaluasi berkelanjutan. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh dari reformasi pendidikan.

**Kata kunci:** Prospek, tantangan, dan kebijakan Pendidikan.

### ABSTRACT

*The education policy landscape is constantly evolving, presenting both promising opportunities and significant challenges. This research attempts to examine the prospects and challenges of current education policies. The primary objective is to evaluate how these policies can enhance educational outcomes while addressing potential obstacles. The method used in this research is a literature review. The primary benefit of a literature review is to understand the current state of research, identify gaps in the literature, and establish a theoretical basis for further research. Results indicate that innovative policies, such as integrating technology in classrooms and promoting inclusive education, show significant potential in improving learning experiences and outcomes. However, challenges such as resource allocation disparities, resistance to change, and socio-economic barriers remain prevalent. The study concludes that while education policies hold substantial promise for transforming education systems, their success largely depends on strategic implementation, stakeholder collaboration, and continuous evaluation. Addressing these challenges is crucial for realizing the full potential of educational reforms.*

**Keywords:** prospects, challenges and educational policies

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kebijakan pemerintah merupakan suatu kebijakan yang mengontrol alokasi dan pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kebaikan masyarakat luas memasukkan kebijakan akademis sebagai komponen yang sangat penting. Pendidikan

merupakan suatu proses dimana pengembangan pribadi yang terarah dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan moral, kepribadian, kekuatan spiritual, dan pengendalian diri seseorang. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengakui gagasan tersebut.

Proses pendidikan ini berlangsung dalam lingkungan belajar yang dirancang untuk menciptakan individu berkualitas yang siap dan aktif menghadapi perubahan zaman. Pada intinya, pendidikan berupaya mewariskan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan manusia serta meningkatkan nasib dan peradaban. Tanpa pendidikan, manusia saat ini tidak akan berbeda jauh dari manusia masa lalu yang masih tertinggal dalam kualitas hidup dan pemberdayaan diri. Secara ekstrem, bisa dikatakan bahwa kemajuan atau kemunduran suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. (Subayil, 2020) Meskipun reformasi di Indonesia diharapkan membawa perubahan besar, terutama di bidang pendidikan, ironisnya, pendidikan di Indonesia justru menghadapi masalah baru dengan munculnya ambiguitas dalam sistem pendidikan. Salah satu ironi adalah ketidakjelasan tujuan pendidikan.

Tantangan utama pendidikan di Indonesia meliputi empat krisis besar: kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen, yang tercermin dalam berbagai indikator terkait. Salah satunya adalah perbandingan situasi pendidikan antar negara di Asia. Keempat masalah tersebut merupakan tantangan yang kompleks dan sulit diatasi. Khususnya, masalah pendidikan menjadi hambatan dalam kemajuan di era globalisasi, dengan salah satu isu utamanya adalah rendahnya kualitas pendidikan akibat kurang efektifnya implementasi

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang menggunakan literatur review melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber informasi yang relevan dan terpercaya dari literatur yang sudah ada untuk mencapai tujuan penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini mencakup identifikasi sumber-sumber primer dan sekunder, evaluasi kritis terhadap kualitas dan relevansi masing-masing sumber, serta integrasi temuan-temuan yang berbeda untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Literatur review sering digunakan untuk merumuskan landasan teoritis, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan mengarahkan penelitian lebih lanjut dengan menyediakan konteks dan wawasan yang berharga berdasarkan penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan adalah proses dan hasil dari penyusunan langkah-langkah dan strategi yang berasal dari visi dan misi pendidikan, dengan tujuan mencapai sasaran pendidikan dalam masyarakat pada periode tertentu. Implementasi kebijakan ini terlihat dalam berbagai bentuk hukum seperti peraturan perundangan, peraturan pemerintah, instruksi presiden, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sejenisnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Isi kebijakan pendidikan mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, seperti kebijakan lingkungan hidup dan lainnya. (Murodah & Muniroh, 2022) Secara umum, kebijakan publik adalah keputusan resmi pemerintah yang mencakup program-program pembangunan untuk menjalankan fungsi negara dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan publik mengatur kehidupan bersama dan tidak berfokus pada individu atau kelompok tertentu. Tujuan utama kebijakan publik adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta

mengembangkan keteraturan politik.

Oleh karena itu, kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti kependudukan, kesehatan, perdagangan, agama, pajak, pendidikan, dan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

Namun, dalam konteks ini, fokus utama adalah pada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merujuk pada kebijakan yang berkaitan dengan sektor pendidikan, bertujuan untuk menunjukkan visi dan misi sekolah demi mencapai tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis dalam pelaksanaannya. (Nanti & Fadriati, 2023) Komponen utama dari kebijakan pendidikan meliputi tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampaknya.

Karakteristik yang ditunjukkan oleh kebijakan yaitu Tujuan yang jelas, kesesuaian dengan kriteria hukum formal, konsep operasional yang ditentukan, persiapan oleh pihak yang berwenang, kemampuan evaluasi, dan sistem yang terorganisir dan sistematis merupakan ciri-ciri kebijakan pendidikan. Diantara pendekatan yang digunakan untuk menerapkan kebijakan pendidikan adalah pendekatan politik, struktur, prosedur, dan manajemen (Patandung & Panggua, 2022)

### **Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan**

Pembuatan kebijakan didasarkan pada tujuan dan visi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 31 Ayat 1 Konstitusi Indonesia 1945. Implementasi pendidikan yang dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan berikutnya kemudian diulang kembali dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di mana rincian lebih lanjut tentang hal tersebut kemudian dijabarkan dalam regulasi pemerintah (Permana et al., 2021)

Selanjutnya, kebijakan pendidikan diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ruang lingkup serta pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaannya. Tingkat kebijakan ini terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Kebijakan nasional dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sering kali disebut sebagai kebijaksanaan administratif. Ini adalah kebijakan yang mencakup seluruh wilayah negara. (2) Kebijakan umum berfungsi sebagai panduan pelaksanaan yang mencakup seluruh instansi atau wilayah. Biasanya dikeluarkan oleh lembaga eksekutif seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan dan Instruksi Presiden. (3) Kebijakan khusus adalah pelaksanaan lebih lanjut dari kebijakan umum yang diambil berdasarkan kerangka kebijakan yang lebih tinggi. Seperti kebijakan umum, kebijakan khusus juga sering disebut sebagai kebijakan eksekutif yang dikeluarkan oleh Menteri untuk mendukung keputusan Presiden. (4) Sebagai perincian dari kebijakan khusus, kebijakan teknis juga dikenal sebagai kebijakan operatif. Kebijakan ini diterbitkan oleh pejabat eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pemimpin lembaga non-departemen, karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan. Produk dari tingkat kebijakan khusus ini mencakup peraturan, keputusan, dan instruksi dari pimpinan lembaga. Melalui kebijakan teknis ini, pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan keadaan lokal oleh Gubernur, Kakanwil, Bupati, hingga Kepala Dinas di berbagai bidang. Ini merupakan penyebab utama variasi dalam implementasi kebijakan dari pusat ke daerah (Lestari M, Mandasari N, 2021)

### **Tantangan-tantangan terkini dalam kebijakan Pendidikan**

Pendidikan menjadi elemen penting dalam proses pembangunan nasional. Peran pemimpin sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya keselarasan antara berbagai pihak terkait. Meskipun

kebijakan pendidikan telah berkali-kali direvisi, masih ada banyak aspek yang belum memenuhi tujuan yang diinginkan. Pemerintah perlu mempertimbangkan cara mengembangkan sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan modern, karena peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam dunia pendidikan dan merupakan investasi untuk menghasilkan individu-individu berkualitas (Tintingon et al., 2023). Berikut beberapa tantangan dalam kebijakan pendidikan:

### **Dimensi kepemimpinan**

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pendidikan sering disesuaikan dengan kepentingan politik penguasa. Pendidikan diarahkan sesuai dengan kebutuhan politik penguasa, sehingga sering digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Kepemimpinan jenis ini berdampak besar pada sektor pendidikan, di mana pedoman yang diikuti bukan profesionalitas, tetapi instruksi dari penguasa. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dan mengurangi hak serta kewenangan profesional, menghasilkan individu yang patuh dan pasif. Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan terjadi transformasi dalam pendidikan yang dapat mengatasi berbagai masalah dan mengarahkan bangsa ke masa depan yang lebih baik. Kompleksitas tuntutan dan tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin meningkat seiring dengan permasalahan sosial yang semakin rumit, mengharuskan peran pendidikan dalam mengatasi masalah global. Arah dan bentuk transformasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang ada. (Yana & Susanti, 2024)

### **Kesenjangan Pendidikan**

Setiap individu berhak menerima pendidikan, namun di Indonesia, mutu pendidikan sering kali rendah dan terdapat banyak kesenjangan. Ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan terlihat pada kurangnya sarana, fasilitas, dan sumber daya pendidik yang tidak optimal. Kesenjangan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

#### **Sarana dan Prasarana**

Fasilitas merupakan elemen penting yang mendukung proses pembelajaran. Gangguan pada sarana dan prasarana dapat berdampak negatif pada penyampaian materi kepada siswa. Masalah sarana dan prasarana umumnya terkait dengan aspek keuangan dalam pendidikan, di mana besaran dan alokasi anggaran pendidikan memengaruhi ketersediaan fasilitas pendidikan. Kualitas pendidikan di sekolah perkotaan umumnya lebih baik dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil, yang sering kekurangan fasilitas. Kondisi ini tercermin dalam laporan media mengenai bangunan sekolah yang rapuh dan berpotensi roboh, yang berdampak negatif pada efektivitas proses belajar mengajar.

#### **Keterbatasan Teknologi**

Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, terutama bagi para guru yang belum mahir menggunakan teknologi, khususnya mereka yang lebih tua. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka. (Yufarika, 2023)

#### **Keterbatasan Pengalaman**

Sebelum pandemi, pembelajaran daring mengalami keterbatasan dalam keterlibatan guru, yang memengaruhi cara penyampaian informasi kepada siswa dan pemahaman mereka terhadap materi. Guru yang biasanya mengajar dengan metode tatap muka harus beralih ke metode online, yang dapat menyebabkan kelelahan dan apatisasi dalam mengajar, sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran (Zahra, 2023).

### III.4 Prospek kebijakan Pendidikan untuk masa depan

Prospek kebijakan pendidikan di masa depan dapat mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mengatasi tantangan di era yang terus berkembang. Beberapa prospek kebijakan pendidikan untuk masa depan adalah sebagai berikut:

#### **Peningkatan Akses Pendidikan**

Pemerintah diperkirakan akan terus berusaha meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Selain melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, upaya juga akan difokuskan pada pengembangan platform pendidikan jarak jauh dan online. Ini akan memungkinkan siswa di daerah terpencil atau yang kurang mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, kebijakan pendidikan gratis selama 12 tahun juga diprediksi akan diperkuat untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat.

#### **Penguatan Pendidikan Vokasi**

Menyadari pentingnya keterampilan praktis dalam menghadapi pasar kerja, pemerintah diperkirakan akan lebih fokus pada pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini mencakup peningkatan kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, investasi lebih lanjut di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diperkirakan akan ditingkatkan untuk menyediakan lebih banyak pilihan dan peluang bagi siswa yang ingin mengembangkan keterampilan praktis.

#### **Peningkatan Mutu Guru**

Peningkatan kualitas guru akan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan. Ini mencakup peningkatan standar kompetensi dan sertifikasi guru, serta penyediaan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga akan ditingkatkan untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang lebih baik bagi guru dalam proses pembelajaran.

#### **Penguatan Pendidikan Karakter**

Selain aspek akademis, pendidikan nilai dan karakter diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas dan kepribadian yang kuat. Program-program seperti pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekstrakurikuler, dan mentoring karakter diperkirakan akan diperkuat untuk membentuk siswa menjadi individu yang lebih baik.

#### **Peningkatan Anggaran Pendidikan**

Pemerintah diperkirakan akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk infrastruktur fisik, sumber daya manusia, dan teknologi pendidikan. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mencapai sekitar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua siswa di Indonesia. (Tawa 2019)

Berikut adalah sub-pembahasan mengenai prospek dan tantangan kebijakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan, diantaranya adalah: (1) Prospek Kebijakan Pendidikan. Prospek kebijakan pendidikan mencakup berbagai peluang dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. (2) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan. Kebijakan pendidikan

yang berfokus pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, termasuk bagi daerah terpencil dan kelompok marjinal. (3) Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran Inovatif.

Prospek lain dari kebijakan pendidikan adalah mengembangkan program studi yang mampu memenuhi persyaratan pasar kerja serta metode pembelajaran yang inovatif, seperti pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global di masa depan. (4) Tantangan Kebijakan Pendidikan. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan efektif. (5) Keterbatasan Sumber Daya dan Pembiayaan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah keterbatasan sumber daya dan pembiayaan. Anggaran yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. (6) Kesenjangan Kualitas Pendidikan. Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan dan menciptakan ketidaksetaraan akses pendidikan yang berkualitas.

## **KESIMPULAN**

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan Pendidikan yang baru seperti mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas serta mendorong pendidikan yang inklusif memiliki kapasitas signifikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan hasil belajar mereka. Namun demikian, masih terdapat tantangan-tantangan menonjol seperti ketimpangan dalam alokasi sumber daya, penolakan terhadap perubahan, serta hambatan sosial-ekonomi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan menyimpan potensi besar untuk bertransformasi, kesuksesan kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang terencana dengan baik, kolaborasi para pemangku kepentingan, serta evaluasi yang berkesinambungan. Mengatasi tantangan-tantangan ini menjadi hal krusial agar reformasi pendidikan dapat mewujudkan potensi penuhnya.

Namun, prospek kebijakan pendidikan di Indonesia tetap optimis dengan adanya berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses. Program digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta kebijakan pemerataan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan sektor pendidikan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, kebijakan pendidikan di Indonesia memiliki banyak peluang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk digunakan bersaing di kancah global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Paper dalam jurnal**

- [1] Lestari M, Mandasari N, F. D. (2021). E-mail: 1. *Linggau Jurnal of Elementary School Education*, 1(2), 24–29.
- [2] Murodah, N., & Muniroh, D. N. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Al-Riwayah : Jurnal*

- Kependidikan, 14(2), 177–187. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v14i2.696>
- [3] Nanti, S., & Fadriati. (2023). Analisis Dampak Globalisasi Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pendidikan di Sekolah. *Equilbirum: Jurnal Pendidikan*, XI, 147–154.
- [4] Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.
- [5] Permana, Y., Dawa Mumtaazy, A., & Rohendi. (2021). Tantangan Pendidikan Indonesia Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Abad 21. *Conference Series Journal*, 01(01), 3. <https://ejournal.upi.edu/index.php/crecs/article/view/32709/pdf>
- [6] Subayil. (2020). Kebijakan Pendidikan Di Era Globalisasi. *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 23(1), 30–44. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- [7] Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- [8] Yana, H. H., & Susanti, L. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi di Madrasah. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.62448/ajpi.v1i1.47>
- [9] Yufarika, S. D. (2023). Tantangan Dunia Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Kebijakan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 156–161. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v2i2.21812>
- [10] Zahra, S. F. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia. *Ibrahim 2013*, 0–2.